

PENGARUH PENDAPATAN DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DENGAN BELANJA DAERAH SEBAGAI MEDIATOR STUDI PADA PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA DI PROVINSI JAMBI

The Effect of Income on Economic Growth with Expenditure as a Mediator: Study on Regency / City Governments in Jambi Province

Hermansyah¹, Haryadi², Siti Hodijah³

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi

hermansyahmusa23@gmail.com¹, haryadi.fe@unja.ac.id², sitihodijah@unja.ac.id³

Diterima : 24 April 2024; Direvisi : 26 Mai 2024; Disetujui : 02 Juli 2024

<https://doi.org/10.37250/khazanah.v8i1.264>

Abstract

This study aims to determine the indirect effect of regional income on economic growth with regional expenditure as a mediator variable. The study area is Jambi Province with 11 regencies / cities as the unit of analysis, covering the period 2017-2022. The analytical tools used in this study are multiple linear regression and sobel test with the help of Eviews 12 and sobel calculator. Local incomes in this study are translated into four variables, namely local taxes, provincial tax revenue sharing funds, central tax revenue sharing funds, and general allocation funds. Meanwhile, local expenditure is translated into two variables, namely personnel expenditure and goods/services and capital expenditure. The results of this study indicate that there are no local income variables that have an indirect impact on economic growth through local expenditure in the Regency/City in Jambi Province. Local expenditure incurred by the Regency/City Government in Jambi Province cannot significantly increase economic activity and community welfare. This is because personnel expenditure and expenditure on goods/services and capital in regencies / cities in Jambi Province are mostly used to finance less productive regional government operational activities. Local governments must intensify their regional revenue receipts in order to improve the quality of goods/services and capital expenditures through programs and activities that are productive and effective and efficient in their use.

Keyword : *Local Income, Local Expenditure, Economic Growth, Taxes Revenue Sharing Funds*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tidak langsung pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai variabel mediator. Wilayah studi ini adalah Provinsi Jambi dengan 11 Kabupaten/Kota sebagai unit analisisnya, dengan cakupan periode tahun 2017-2022. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan uji sobel dengan bantuan Eviews 12 dan kalkulator sobel. Pendapatan daerah dalam penelitian ini dijabarkan ke dalam empat variabel, yaitu pajak daerah, dana bagi hasil pajak provinsi, dana bagi hasil pajak pusat, dan dana alokasi umum. Sedangkan belanja daerah dijabarkan ke dalam dua variabel, yaitu belanja pegawai serta belanja barang/jasa dan modal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tidak ada variabel pendapatan daerah yang berdampak tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi. Belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi tidak dapat meningkatkan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat secara signifikan. Hal ini disebabkan karena belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan modal pada Kabupaten/Kota dalam Provinsi Jambi lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan operasional Pemerintah Daerah yang kurang produktif. Pemerintah daerah harus melakukan intensifikasi penerimaan pendapatan daerahnya agar dapat meningkatkan kualitas belanja barang/jasa dan modal melalui program dan kegiatan yang bersifat produktif serta efektif dan efisien penggunannya.

Kata Kunci : *Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, Dana Bagi Hasil*

PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mencerminkan kebijakan Pemerintah dalam menyediakan barang dan jasa publik yang dibutuhkan masyarakat daerah. Untuk mendorong dan menstimulasi kegiatan perekonomian masyarakat lokal, diperlukan ketersediaan barang dan jasa publik. Oleh karena itu, peran Pemerintah Daerah dalam pengelolaan anggaran sangat penting untuk meningkatkan hasil pembangunan.

Kewenangan mengelola dan menyusun keuangan daerah masing-masing akan menjamin tanggung jawab daerah dalam pengalokasian distribusi dan sumber daya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan pada akhirnya mendorong kesejahteraan umum. Hal ini sesuai dengan pendapat Jingga (2016) bahwa bahwa peran belanja Pemerintah dalam pembangunan ekonomi adalah untuk meningkatkan laju pertumbuhan, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan dan taraf hidup serta menciptakan keseimbangan perekonomian daerah.

Sebagian besar kegiatan pengelolaan anggaran Pemerintah Daerah meliputi pendapatan dan belanja. Hal ini terkait dengan

pengalokasian pengeluaran Pemerintah untuk menyediakan barang dan jasa publik sesuai dengan pendapatan yang diterima (redistribusi pendapatan). Dalam ilmu ekonomi publik, konsep ini disebut public choice artinya Pemerintah menentukan alokasi jumlah barang dan jasa publik melalui proses politik sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, n.d., sumber pendapatan daerah berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah seluruh pendapatan daerah yang diperoleh dari potensi ekonomi asli suatu daerah, meliputi pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. Selain itu, dana perimbangan bersumber dari Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah mencakup Hibah, Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus, Bantuan Keuangan dari Provinsi, dan Dana Desa. Seluruh

pendapatan tersebut merupakan sumber pendapatan yang dapat didistribusikan kembali kepada masyarakat dalam bentuk barang dan jasa publik. Dari sisi belanja daerah, belanja Pemerintah Daerah dibagi menjadi beberapa jenis belanja daerah, yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, serta belanja modal.

Untuk memenuhi penerimaan pendapatan daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukannya dengan cara menyediakan barang dan jasa publik yang berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah harus mengoptimalkan pendapatan asli daerah dan melakukan restrukturisasi belanja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan Pemerintah Daerah untuk memenuhi belanja daerah dibandingkan penerimaan melalui pendapatan pajak bisa diprediksi. Secara teori, penerimaan Pemerintah yang dipungut melalui pajak secara berlebihan akan mengakibatkan pertumbuhan ekonomi daerah cenderung mengalami *economic downturn*.

Menurut teori Peacock dan Wiseman, Pemerintah selalu berusaha meningkatkan pengeluaran sedangkan masyarakat tidak suka

membayar pajak yang besar (Mangkoesoebroto, 2008). Penerapan anggaran dengan meningkatkan pendapatan pajak akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.

Terkait Dana Bagi Hasil, beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa dana bagi hasil mempunyai pengaruh positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi (Hasan, 2015; Hendriwiyanto, 2014; Susilo & Irianti, 2021) menemukan bahwa realisasi dana perimbangan selalu meningkat dan mengalami fluktuasi. Pemerintah Daerah dapat menggunakan sumber penerimaan dana perimbangan lainnya yang berasal dari Dana Alokasi Umum. Banyak daerah di Indonesia memiliki penerimaan dana alokasi umum lebih besar dibandingkan penerimaan daerah lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa secara administratif terdapat ketergantungan terhadap sumber pendanaan dari Pemerintah Pusat dalam pengelolaan keuangan.

Daerah yang mengandalkan pendanaan Pemerintah Pusat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah yang lebih rendah. Namun daerah dengan nilai pendapatan asli daerah yang lebih tinggi atau ketergantungan yang lebih kecil terhadap dana

perimbangan Pemerintah Pusat cenderung memiliki pertumbuhan ekonomi dan kemandirian daerah yang tinggi.

Pertumbuhan ekonomi daerah sangat erat kaitannya dengan belanja Pemerintah Daerah. Belanja Pemerintah Daerah merupakan salah satu bentuk peran Pemerintah dalam mengatur perekonomian daerah. Peran belanja Pemerintah Daerah terhadap perekonomian diwujudkan dalam bentuk kebijakan yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi (PDRB) dan mempengaruhi dinamika perekonomian daerah. Wagner (1890) menyatakan bahwa belanja Pemerintah mencerminkan tingkat pendapatan Pemerintah. Belanja Pemerintah adalah biaya atau anggaran yang dikeluarkan atau direncanakan akan dikeluarkan oleh Pemerintah untuk membiayai seluruh program dan kegiatan perekonomiannya.

Belanja modal Pemerintah Daerah antara lain digunakan untuk memperbaiki dan membangun infrastruktur di bidang pendidikan, kesehatan, transportasi, dan pelayanan publik lainnya, sehingga masyarakat di daerah dapat memperoleh manfaat dari pembangunan daerah. Hal ini penting karena Pemerintah Kabupaten/Kota

secara geografis paling dekat dengan tempat tinggal masyarakat. Pelayanan publik yang optimal diharapkan dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah karena Pemerintah Daerah merupakan ujung tombak pelayanan publik. Ketersediaan infrastruktur yang baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas di berbagai sektor, meningkatkan produktivitas masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Munawar et al., (2018) menemukan bahwa kebijakan Pemerintah yang memprioritaskan belanja untuk investasi diharapkan menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek. Belanja Pemerintah (belanja investasi) diharapkan dapat merangsang dan meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB). Sejalan dengan itu, pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat. Kondisi ini berdampak pada peningkatan kesejahteraan rumah tangga (peningkatan pendapatan) dan peningkatan konsumsi, tabungan, dan investasi. Berbeda dengan Hartati (2012), hasil penelitiannya menunjukkan dampak negatif, yaitu belanja Pemerintah hanya berpengaruh kecil terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa anggaran Pemerintah yang diwakili oleh pendapatan daerah dan belanja daerah mempunyai dampak yang beragam terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasilnya menunjukkan temuan yang beragam, ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh. Berbagai penelitian mempunyai jawaban berbeda mengenai dampak pendapatan dan belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan. Hal ini tidak mengherankan karena setiap peneliti menggunakan metode yang berbeda sehingga menghasilkan hasil yang berbeda pula.

Provinsi Jambi yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) menganut sistem Pemerintahan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Undang-undang ini telah mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara

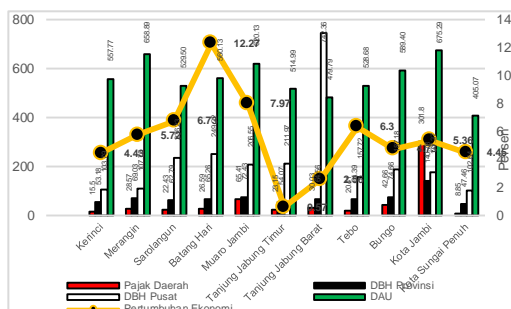
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, setiap daerah diberikan kewenangan yang luas dalam pengelolaan pembangunan sesuai kewenangannya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Secara umum pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi cenderung mengalami penurunan dari tahun 2017 hingga tahun 2020. Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 3,93% dan meningkat kembali pada tahun 2022 sebesar 5,55%.

Dilihat dari sektor Pendapatan Asli Daerah, pajak daerah merupakan sumber pendapatan tertinggi dibandingkan sumber lainnya. Rata-rata pajak daerah memberikan kontribusi sebesar 64,52% terhadap total Pendapatan Asli Daerah, atau memberikan kontribusi rata-rata sebesar 11,79% terhadap pendapatan daerah.

Pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi rata-rata sekitar 5,55% pada tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi setiap daerah berbeda-beda. Meskipun terdapat karakteristik daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi dan

terendah, namun hal tersebut tidak serta merta mencerminkan tingkat pendapatan daerah yang sebanding. Misalnya saja di Provinsi Jambi, Kota Jambi memiliki pendapatan daerah terbesar pada tahun 2022, akan tetapi Kota Jambi bukanlah daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Provinsi Jambi. Hal ini tentu menarik karena meskipun memiliki pendapatan daerah terbesar, tetapi hal tersebut tidak mencerminkan tingkat pertumbuhan ekonomi untuk masing-masing daerah di Provinsi Jambi.



Gambar 1. Pertumbuhan Ekonomi, Pajak Daerah, DBH Pusat, DBH Provinsi dan Dana Alokasi Umum Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen, sedangkan lainnya dalam miliar rupiah
 Sumber: DJPK.Kemenkeu dan BPS Provinsi Jambi, 2023 (Data Diolah)

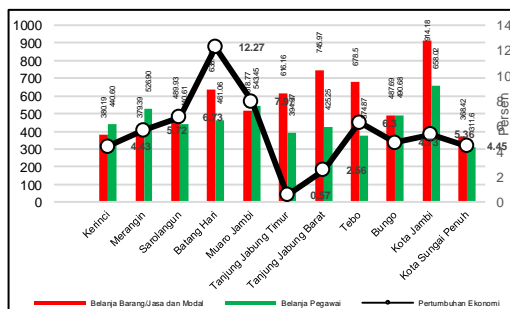
Pada tahun 2022, beberapa daerah di Provinsi Jambi memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi, seperti Kabupaten Batang Hari, Kabupaten Muaro Jambi, dan

Kabupaten Sarolangun. Dari sisi pendapatan daerah, Dana Alokasi Umum secara umum merupakan sumber penerimaan daerah terbesar bagi hampir seluruh Kabupaten/Kota tersebut. Berbeda dengan Kota Jambi, meskipun memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi sebesar 5,36%, Kota Jambi memiliki pendapatan daerah dari sektor pajak tertinggi diantara seluruh Kabupaten/Kota lain di Provinsi Jambi. Hal ini kemungkinan besar disebabkan oleh faktor demografi dan kapasitas ekonomi yang besar dibandingkan daerah lain, sehingga menunjang penerimaan pendapatan dari sektor pajak daerah.

Dengan adanya pendapatan asli daerah khususnya dari sektor pajak daerah, tentunya hal ini akan menjadi potensi sumber pendanaan untuk melaksanakan program Pemerintah Daerah. Hal ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemenuhan pengadaan barang dan jasa publik. Belanja daerah harus tepat sasaran melalui kebijakan belanja daerah seperti belanja pegawai, belanja barang/jasa, serta belanja modal.

Berdasarkan data BPKPD Provinsi Jambi tahun 2022 (Gambar 2) menunjukkan bahwa total belanja

barang/jasa ditambah belanja modal bukanlah belanja utama yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota melalui kebijakan anggarannya. Namun beberapa daerah seperti Kabupaten Merangin, Kabupaten Kerinci dan Kabupaten Muaro Jambi membelanjakan anggaran terbesarnya untuk belanja pegawai. Meskipun besaran anggaran belanjanya tidak jauh berbeda, namun hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat Kabupaten/Kota yang memiliki keterbatasan anggaran belanja barang/jasa dan belanja modal.



Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi, Belanja Barang/Jasa dan Modal, dan Belanja Pegawai Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, 2022

Ket: Pertumbuhan ekonomi dalam persen sedangkan lainnya dalam miliar rupiah.
 Sumber: DJPK.Kemenkeu dan BPS Provinsi Jambi, 2023 (Data Diolah)

Kota Jambi mempunyai kapasitas anggaran pendapatan dan belanja daerah tertinggi di Provinsi Jambi dengan total belanja barang/jasa dan belanja modal

sebesar 914,18 miliar Rupiah dan belanja pegawai sebesar 658,02 miliar Rupiah pada tahun 2022. Meski memiliki anggaran belanja tertinggi, pertumbuhan ekonomi Kota Jambi cenderung lebih rendah dibandingkan dengan Kabupaten Batang Hari atau Kabupaten Muaro Jambi. Walaupun pertumbuhan ekonomi beberapa Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi memiliki tren yang hampir sama, namun masih terdapat perbedaan pada penerimaan pajak daerah, dana bagi hasil dan dana alokasi umum serta realisasi belanja pegawai, belanja barang/jasa dan belanja modal pada setiap daerah di Provinsi Jambi.

Mencermati data pertumbuhan ekonomi dan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi, dapat disimpulkan sebuah fenomena yang menarik. Tingginya penerimaan daerah, termasuk tingginya pajak daerah, tidak menjamin laju pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih rendah atau lebih tinggi dibandingkan dengan laju pertumbuhan ekonomi daerah lain. Begitu juga perbedaan dalam belanja daerah, belanja yang tinggi tidak serta merta mengakibatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pola belanja di setiap Kabupaten/Kota juga relatif sangat berbeda. Daerah

seperti Kota Jambi memiliki jumlah belanja barang/jasa dan belanja modal yang jauh lebih tinggi di atas belanja pegawai.

Jika fenomena yang diamati di Provinsi Jambi dikaitkan dengan hasil penelitian-penelitian sebelumnya, maka menarik untuk mengelaborasi fenomena tersebut lebih dalam. Seperti yang telah disebutkan, hubungan antara pendapatan atau belanja dengan pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jambi masih belum menunjukkan pola yang jelas, meskipun penelitian-penelitian sebelumnya dengan topik yang sama memberikan hasil yang berbeda-beda. Hal ini menjadi alasan penting mengapa peneliti ingin mengkaji permasalahan yang sama dengan mengambil Provinsi Jambi sebagai kasus empiriknya. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap lebih dalam bagaimana hubungan antara struktur penerimaan daerah dan belanja daerah dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota.

Secara khusus penelitian ini tidak bertujuan untuk melihat pengaruh kemandirian anggaran suatu daerah seperti banyak penelitian sebelumnya, tetapi lebih fokus pada pengaruh penerimaan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi. Penerimaan daerah yang

terkait dengan potensi pajak meliputi tiga macam, yaitu: Pajak Daerah (PD), Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi (DBH Pajak Prov), dan Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat (DBH Pajak Pusat). Ketiga jenis sumber penerimaan ini menjadi menarik karena besarnya bergantung pada potensi daerah masing-masing serta upaya dan peran strategis Pemerintah Kabupaten/Kota dalam meningkatkan sumber pendapatan daerah.

Selain ketiga variabel tersebut, penelitian ini juga mempertimbangkan pengaruh pendapatan daerah berupa dana alokasi umum. Alasan penggunaan dana alokasi umum sebagai variabel tersendiri dan terpisah dari variabel penerimaan lainnya adalah karena di satu sisi dana alokasi umum memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota sedangkan besaran dana alokasi umum tidak berhubungan langsung dengan upaya dan peran Pemerintah Kabupaten/Kota dalam memanfaatkan potensi riil daerahnya.

Pengklasifikasian variabel belanja berdasarkan jenis belanja dibagi menjadi tiga jenis belanja yaitu: Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa, dan Belanja Modal. Peneliti lebih memilih

mengklasifikasikan belanja menurut jenisnya karena lebih menggambarkan fungsi ekonomi dari belanja. Belanja Pegawai dipandang sebagai belanja yang bersifat konsumtif dan masa pakainya pendek, sedangkan Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal dipandang sebagai belanja yang bersifat produktif dan masa pakainya lebih panjang. Oleh karena itu, variabel belanja dalam penelitian ini hanya ada dua yaitu Belanja Pegawai (BP) dan Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM).

Untuk menghubungkan pendapatan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, penelitian ini menggunakan belanja daerah sehingga memposisikan belanja daerah sebagai variabel mediasi (intervening). Alasannya, ketika Pemerintah Kabupaten/Kota menerima pendapatan dan mencatatnya dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah, maka penerimaan tersebut belum berdampak pada kegiatan dan pertumbuhan ekonomi. Alasan ini tentu saja bisa diterima. Selain itu, ketika penerimaan tersebut dibelanjakan, pada saat itulah penerimaan daerah mulai mempengaruhi kegiatan dan juga pada saat yang sama mempengaruhi

pertumbuhan ekonomi daerah. Inilah sebabnya mengapa belanja ditempatkan sebagai variabel mediasi dalam penelitian ini.

LANDASAR TEORI

Tujuan belanja negara adalah untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Belanja Pemerintah berhubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi. Perubahan pada belanja Pemerintah akan mempengaruhi tingkat pendapatan di suatu negara. Idealnya, ketika belanja Pemerintah meningkat, maka pendapatan yang diterima masyarakat juga akan meningkat dan sebaliknya. Jika pendapatan yang diterima masyarakat meningkat, maka pertumbuhan ekonomi pun akan meningkat.

Hubungan belanja Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi juga dapat dilihat dari kebijakan belanja (*expenditure policy*) dan pengelolaan belanja (*expenditure management*) yang ditetapkan oleh Pemerintah. Dimana kebijakan ekonomi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah akan mempengaruhi arah kebijakan fiskal. Pada prinsipnya, menurut teori klasik, kunci kebijakan ekonomi adalah mencapai pertumbuhan ekonomi. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, pengelolaan belanja daerah menitikberatkan pada

efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran untuk berbagai program pembangunan.

Teori Wagner tentang perkembangan belanja Pemerintah adalah *Wagner Law of Increased Government Activity*. Teori ini mengemukakan pertumbuhan belanja Pemerintah yang semakin besar sebagai persentase terhadap *Gross National Product* (GNP), dimana teori ini berdasarkan observasi di negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19. Wagner mengemukakan pendapatnya bahwa dalam suatu perekonomian, jika pendapatan per kapita meningkat maka pengeluaran Pemerintah juga akan meningkat, terutama karena Pemerintah harus mengatur hubungan-hubungan yang timbul dalam masyarakat, hukum, pendidikan, hiburan, budaya, dan lain-lain.

Teori yang membahas tentang hubungan pengeluaran Pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi dijelaskan secara rinci dalam *The General Theory Keynes*. Teori ini menjelaskan bahwa pendapatan total perekonomian dalam jangka pendek sangat ditentukan oleh keinginan rumah tangga, dunia usaha dan Pemerintah untuk membelanjakan pendapatannya. Untuk memodelkan

pandangan Keynesian mengenai pengaruh belanja Pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi, diilustrasikan dengan model yang disebut perpotongan Keynesian (Mankiw, 2003).

Peacock dan Wiseman mengungkapkan pandangan berbeda untuk menjelaskan perilaku Pemerintah. Mereka mendasarkannya pada analisis penerimaan belanja Pemerintah. Pemerintah selalu berupaya meningkatkan belanjanya dengan mengandalkan peningkatan penerimaan pajak. Padahal masyarakat tidak suka membayar pajak yang besar. Teori Peacock dan Wiseman adalah:

“Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat walaupun tarif pajak tidak berubah; dan meningkatnya penerimaan pajak menyebabkan pengeluaran Pemerintah juga semakin meningkat, oleh karena itu dalam keadaan normal, meningkatnya GNP menyebabkan penerimaan Pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran Pemerintah menjadi semakin besar.”

Penerimaan Negara

Penerimaan negara adalah pendapatan suatu negara yang berasal dari penerimaan pajak,

penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan hibah yang diterima dari dalam negeri dan luar negeri, Suparmoko (1997) berpendapat bahwa penerimaan negara adalah penerimaan Pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh Pemerintah, pinjaman Pemerintah, mencetak uang, dan lain-lain.

Sumber-Sumber Penerimaan Negara:

1. Pendapatan Pajak
2. Pendapatan Non Pajak

Pendapatan Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 disebutkan bahwa pendapatan daerah adalah semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak Pemerintah Daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sumber Pendapatan Daerah terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
2. Dana Perimbangan;
3. Lain-lain penerimaan yang sah.

Belanja Daerah

Belanja daerah adalah penggunaan dana atau anggaran Pemerintah Daerah untuk membiayai kegiatan dan program yang berkaitan dengan penyelenggaraan

Pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik di daerahnya. Dalam penelitian ini belanja daerah dikelompokkan menjadi 2 yaitu:

1. Belanja Barang/Jasa dan Modal
2. Belanja Pegawai

Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah berkembangnya kegiatan perekonomian yang menyebabkan peningkatan barang dan jasa yang diproduksi (Sukirno, 2019). Beberapa teori yang dikembangkan oleh para ekonomi sebelumnya, antara lain teori pertumbuhan Solow dan Swan, teori pertumbuhan Harrod Domar, dan teori pertumbuhan Endogen.

Teori pertumbuhan neoklasik Solow dikembangkan untuk menunjukkan peran investasi (*capital stock*), pertumbuhan penduduk (tenaga kerja produktif), dan penggunaan teknologi dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara dengan asumsi utama bahwa investasi atau modal mengalami *diminishing returns* (Berg.HVD, 2001). Pertumbuhan ekonomi yang pesat dicapai jika investasi meningkat dan pada saat yang sama Angkatan kerja produktif serta teknologi meningkat secara bersamaan. Kondisi ini akan mencapai keseimbangan pertumbuhan ekonomi jangka panjang

atau dikenal dengan istilah *Steady State*.

Teori Solow-Swan menjelaskan bahwa dalam banyak kasus, mekanisme pasar dapat menciptakan keseimbangan, sehingga Pemerintah tidak perlu terlalu banyak melakukan intervensi terhadap pasar. Intervensi Pemerintah hanya terbatas pada kebijakan fiskal dan kebijakan moneter.

Teori Harrod Domar menekankan pentingnya peran investasi (I). Mereka berpendapat bahwa investasi (I) mempengaruhi permintaan agregat (Z) melalui proses multiplier, dan mempengaruhi penawaran agregat (S) melalui pengaruhnya terhadap kapasitas produksi. Investasi (I) dapat dipahami sebagai tambahan stok kapital (D K). Jadi $I = DK$.

Teori ini menganalisis faktor-faktor pertumbuhan ekonomi yang berasal dari dalam (*endogen*) sistem perekonomian itu sendiri. Kemajuan teknologi dianggap endogen, sepanjang pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari keputusan para pelaku ekonomi untuk berinvestasi di bidang ilmu pengetahuan. Pengertian modal dalam teori ini bersifat lebih luas, tidak hanya modal fisik tetapi juga mencakup modal manusia (*human capital*)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan menggunakan data panel periode 2017 – 2022.

Alat analisis yang digunakan adalah regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis sobel yakni uji yang dilakukan untuk menguji pengaruh tidak langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen jika melewati faktor mediasi seperti variabel BBJM dan BP. Tahap pertama dalam pengujian ini adalah mengalikan koefisien jalur antara setiap variabel independen (ρ_a) terhadap variabel mediasi atau *intervening* dengan koefisien jalur variabel mediasi atau *intervening* (ρ_b) terhadap variabel dependen tersebut.

Persamaan model jalur di atas dibentuk melalui 3 persamaan regresi linier berganda data panel :

$$\begin{aligned}
 BBJM_{it} &= \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 DBHProv_{it} \\
 &\quad + \beta_3 DBHPst_{it} \\
 &\quad + \beta_4 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \\
 BP_{it} &= \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 DBHProv_{it} \\
 &\quad + \beta_3 DBHPst_{it} \\
 &\quad + \beta_4 DAU_{it} + \varepsilon_{it} \\
 PE_{it} &= \beta_0 + \beta_1 PD_{it} + \beta_2 DBHProv_{it} \\
 &\quad + \beta_3 DBHPst_{it} \\
 &\quad + \beta_4 DAU_{it} \\
 &\quad + \beta_5 BBJM_{it} + \beta_6 BP_{it} + \varepsilon_{it}
 \end{aligned}$$

Dimana:

- β_0 : Konstanta
- PD : Pajak Daerah
- DBH Prov : Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi
- DBH Pst : Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat
- DAU : Dana Alokasi Umum

- BBJM : Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal
- BP : Belanja Pegawai
- PE : Pertumbuhan Ekonomi
- $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$: Koefisien
- ε : error
- i : Kabupaten/Kota -i
- t : Tahun ke-t

Selanjutnya hasil tahap pertama dilakukan pencarian standar error dari koefisien *indirect effect* ($Sp_a\rho_b$) tersebut atau dikenal dengan rumus Uji Sobel yang persamaannya sebagai berikut:

$$Sp_a\rho_b = \sqrt{(\rho_b)^2 (Sp_a)^2 + (\rho_a)^2 (Sp_b)^2 + (Sp_a)^2 (Sp_b)^2}$$

Dimana:

$Sp_a\rho_b$ = *standard error* koefisien *Indirect Effect*;

Sp_a = *standard error* pengaruh variabel independen terhadap variabel yang dijadikan mediasi atau *intervening*;

Sp_b = *standard error* pengaruh variabel mediasi atau *intervening* terhadap variabel dependen.

Pada langkah terakhir, untuk menguji signifikansi pengaruh tidak langsung tersebut, perlu dihitung nilai t dari koefisien ab ($\rho_a\rho_b$) sesuai dengan rumus berikut:

$$t = \frac{\rho_a\rho_b}{Sp_a\rho_b}$$

Nilai t hitung dari persamaan di atas dibandingkan dengan nilai t tabel, jika nilai t hitung > nilai t tabel maka dapat disimpulkan terjadi pengaruh mediasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil estimasi pengaruh tidak langsung dapat dilihat pada tabel 1.

Temuan yang mengenai pengaruh tidak langsung adalah tidak ada variabel pendapatan yang memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Variabel Belanja Barang/Jasa dan Modal (BBJM) dan Belanja Pegawai yang sebelumnya diharapkan menjadi penghubung yang baik justru tidak terbukti.

Tabel 1. Hasil Pengujian Pengaruh Tidak Langsung

Variable	Mediator	Dampak Tidak Langsung ($\rho_a \times \rho_b$)	P-Value
PD → PE	BBJM	-0,00287	0.73163969
PD → PE	BP	-0,01153	0.1268854
DBH_Prov → PE	BBJM	0,00138	0.73842424
DBH_Prov → PE	BP	0,01924	0.10555929
DBH_Pst → PE	BBJM	-0,00094	0.73159361
DBH_Pst → PE	BP	0,00096	0.47926914
DAU → PE	BBJM	-0,00052	0.73385233
DAU → PE	BP	0,0068	0.21736909

Sumber : Kalkulator Sobel Test (<https://quantpsy.org/sobel/sobel.htm>)

Hasil ini menunjukkan bahwa variabel Belanja Pegawai dan dan Belanja Barang/Jasa dan Modal tidak mempunyai peranan tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Artinya, pendapatan daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dari Pusat dan dari Provinsi, Pajak Daerah dan Dana Alokasi Umum yang dialokasikan pada Belanja Barang/Jasa dan Modal serta Belanja Pegawai tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini disebabkan karena Belanja Pegawai

dan belanja barang/jasa masih direalisasikan untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak produktif dalam meningkatkan kapasitas perekonomian daerah. Jenis belanja ini tidak banyak memberikan pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini merupakan tantangan yang perlu dijawab oleh Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi.

Menurut Vedder & Gallaway (1998), kegiatan pemerintah juga dapat mempunyai dampak negatif terhadap produktivitas ekonomi, pada saat *law of diminishing return* terjadi dimana ekspansi yang dilakukan terus menerus oleh pemerintah akan menempatkan pengeluaran pada kegiatan yang kurang produktif. Pada akhirnya pemerintah menjadi terlalu luas dan akan melakukan banyak kegiatan yang tidak sejalan dengan tujuannya. Jika hal ini terjadi, hasil negatif akan muncul dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara pendapatan daerah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui belanja daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jambi. Hal ini disebabkan karena belanja daerah yang dikeluarkan oleh Pemerintah

Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi masih kurang efektif dan produktif. Penggunaan belanja daerah tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap peningkatan kegiatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Semua variabel penerimaan pendapatan daerah tidak memiliki pengaruh tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi dengan belanja daerah sebagai mediator. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas Belanja Pegawai dan Belanja Barang/Jasa dan Modal masih belum sesuai dengan yang diharapkan, sehingga belum bisa menjadi variabel penghubung antara pendapatan daerah dan pertumbuhan ekonomi.

Kebijakan yang dapat dikembangkan oleh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan penerimaan pendapatan daerah dari sektor pajak, sehingga dapat meningkatkan belanja pegawai dan belanja barang/jasa dan modal. Selanjutnya, Pemerintah Daerah harus meningkatkan kualitas belanja barang/jasa dan modal melalui program dan kegiatan yang efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

Hasan, M. (2015). Pengaruh Dana Transfer Pusat terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah

- Kabupaten/Kota di Sulawesi Selatan. *Jurnal Ekonomi*, 3(1).
- Hendriwiyanto, G. (2014). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Dengan Belanja Modal Sebagai Variabel Mediasi Guntur. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 3(1).
- Jingan, M. L. (2016). *Ekonomi pembangunan dan perencanaan* (Cetakan ke-17). Rajawali Pers.
- Mangkoesoebroto, G. (2008). *Ekonomi Publik*. BPFE.
- Mankiw, N. G. (2003). *Teori Makro Ekonomi: Vol*. Erlangga.
- Munawar, I., Budi Santosa, D., & Erani Yustika, A. (2018). *Sistem ekonomi Indonesia: tafsiran Pancasila dan UUD 1945* (N. Indra Sallama, Ed.; Cetakan ke-5, 2018). Erlangga.
- Sukirno, S. (2019). *Teori Pengantar Makro Ekonomi* (Cetakan ke-25). Rajawali Pers.
- Suparmoko, M. (1997). *Keuangan negara dalam teori dan praktek* (4th ed.). BPPE_Yogyakarta.
- Susilo, D. E., & Irianti, D. F. (2021). Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Pada Belanja Modal di Kota Mojokerto (Studi Kasus Pada BPPKA Mojokerto Periode 2014-2019). *Khazanah Intelektual*, 5(1).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah*. (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004*. (n.d.).
- Vedder, R. K., & Gallaway, L. E. (1998). Government size and economic growth. *Joint Economic Committee*.